

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM PENERTIBAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh:

ROY RIZKY SANGKOT PARULIAN SILABAN

170710067

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM PENERTIBAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
ROY RIZKY SANGKOT PARULIAN SILABAN
170710067**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Roy Rizky Sangkot Parulian Silaban

NPM : 170710067

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

“PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA BATAM”

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Batam, 29 Juli 2021



Roy Rizky Sangkot Parulian Silaban
170710067

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM PENERTIBAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana**

Oleh

**Roy Rizky Sangkot Parulian Silaban
170710067**

**Telah di setujui oleh pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 29 Juli 2021



**Zuhdi Arman, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Kewenangan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bukanlah tanpa alasan. Namun, didukung oleh dasar pijakan yuridis yang jelas. Demikian pula pada Pasal 255 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan dibentuknya Satpol PP guna untuk membantu kepala daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan penyelenggaraan ketertiban umum serta menjaga ketentraman masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana peran Satpol PP dalam penertiban pekerja seks komersial di Kota Batam. Penelitian ini dilakukan di Marko Satpol PP Batam dengan mengumpulkan data melalui wawancara narasumber. Hasil dari penelitian adalah, dalam penertiban pekerja seks komersial di Kota Batam Satpol PP berperan mendampingi Dinas Sosial dalam melakukan pendataan dan penertiban terhadap pekerja seks komersial di Kota Batam. Dalam upaya penertiban pekerja seks komersial di Kota Batam, Satpol PP menemukan beberapa kendala yaitu salah satunya adalah Satpol PP tidak memiliki tempat penampungan untuk pekerja seks komersial yang terjaring dalam razia.

Kata kunci: Satpol PP, PSK Batam

ABSTRACT

The authority given to the Civil Service Police Unit to maintain public security and order is not without reason. However, it is supported by a clear juridical basis. Likewise in Article 255 Paragraphs (1) and (2) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, which mandates the establishment of Satpol PP to assist regional heads in enforcing Regional Regulations (PERDA) and administering public order and maintaining public peace. To find out how the role of Satpol PP in controlling commercial sex workers in Batam City. This research was conducted at the Marko Satpol PP Batam by collecting data through interviewing sources. The results of the research are, in controlling commercial sex workers in Batam City, Satpol PP plays a role in assisting the Social Service in collecting data and controlling commercial sex workers in Batam City. In an effort to control commercial sex workers in Batam City, Satpol PP found several obstacles, one of which was that Satpol PP did not have a shelter for commercial sex workers who were caught in raids.

Keyword: Satpol PP, PSK Batam

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. DR. Nur Elfi Husda S.Kom.,MSI., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. DR. Micheal Jibreal Rorong, S.T., M.I.Kom. selaku Dekan Falkutas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Padrisan Jamba S.H.,M.H, selaku Kaprodi Ilmu Hukum, Falkutas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
4. Bapak Zuhdi Arman, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Skripsi pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.
6. Bapak Rudi Zulkarkain dan Ibu Hamida Saragi, selaku narasumber.
7. Orang tua penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

8. Adik yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
9. Kawan-kawan seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Batam, 29 Juli 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roy' followed by a stylized surname.

Roy Rizky Sangkot Parulian Silaban

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Batasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Kerangka Teori.....	13
2.1.1 Teori Peranan	13
2.1.2 Teori Penegakan hukum	14
2.1.3 Pekerja Seks Komersial	18
2.2 Kerangka Yuridis.....	19
2.2.1 Satuan Polisi Pamong Praja	19
2.2.2 Dasar Hukum Mengenai Satuan Polisi Pamong Praja.....	22
2.3 Penelitian Terdahulu	24
2.4 Kerangka Pemikiran	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis-Jenis Penelitian	31
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.2.1 Jenis data	33
3.2.2 Alat Pengumpulan Data	34

3.2.3 Lokasi Penelitian	35
3.3 Metode Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Hasil Penelitian.....	36
4.1.1 Gambaran Umum Objek Lokasi Penelitian	36
4.1.2 Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pekerja Seks Komersial Di Kota Batam.....	37
4.1.3 Kendala yang Dihadapi Oleh Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pekerja Seks Komersial di Kota Batam	38
4.1.4 Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pekerja Seks Komersial Di Kota Batam.....	38
4.2 Pembahasan.....	38
4.2.1 Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pekerja Seks Komersial Di Kota Batam.....	38
4.2.2 Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pekerja Seks Komersial Di Kota Batam	42
4.2.3 Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pekerja Seks Komersial Di Kota Batam.....	45
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	49
5.1 Simpulan	49
5.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian	



Universitas Putera Batam